



# Bansos Rp 4 Miliar

## Terancam Mubazir

**Eksekutif diingatkan tidak memaksakan mencairkan bansos, sehingga tidak terjadi temuan di kemudian hari. Apalagi banyak pejabat yang terjerat hukum karena salah prosedur.**

AMLAPURA, NusaBali  
Bantuan sosial senilai total Rp 4 miliar di APBD Perubahan 2015 Kabupaten Karangasem, terancam mubazir akibat terganjal dalam teknis pencairan.

Sebab, pencairannya mesti kepada lembaga berbadan hukum, mengacu UU No 23 tahun 2014. Segecap anggota DPRD Karangasem pun mengingatkan, agar eksekutif tidak memaksakan pencairan bansos itu, kalau tidak ingin berekses hukum, ujung-ujungnya masuk penjara.

Sejumlah anggota Anggota DPRD Karangasem antara lain I Komang Sudanta, I Wayan Suastika, I Kadek Sujanayasa dan I Ketut Sulandra menegaskan hal itu secara terpisah di Amlapura, Minggu (9/8).

Sudanta mengingatkan eksekutif, agar tidak memaksakan mencairkan bansos, sehingga tidak terjadi temuan di kemudian hari. Apalagi, pejabat eksekutif belakangan ini satu per satu mulai diadili gara-gara kesalahan prosedur mengelola keuangan negara.

Sudanta menambahkan, ses-

uai UU No 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, khususnya pasal 298 (4) dan ayat (5). Lebih spesifik lagi bunyi ayat (5) Belanja hibah sebagai mana pada ayat (4) dapat diberikan kepada: pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

"Itu berarti secara tegas undang-undang mengatur, bansos hanya boleh dialokasikan untuk lembaga berbadan hukum. Walau proposal terlanjur masuk dan telah diverifikasi, sebaiknya dibatalkan penganggarannya, agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari," pinta Sudanta, politisi PDIP dari Banjar/Desa Tegallinggang, Kecamatan Karangasem.

Atas dasar itulah, di pemba-

hasan APBD Perubahan 2015, yang teragendakan Selasa (11/8), agar pengalokasian bansos bukan kepada lembaga yang tidak berbadan hukum.

"Kasih pimpinan SKPD nanti, terpeleset ke kasus hukum. Bawa saja bansos itu untuk kegiatan. Eksekutif juga jangan semata-mata berkonsultasi ke Mendagri, mengenai hal itu, bisa mendapatkan jawaban yang keliru. Konsultasi saja ke BPK atau KPK," pintanya.

Kadek Sujanayasa, dari Partai NasDem, juga mengingatkan demikian.

"Sebenarnya pencairan bansos sebelumnya bersumber dari dana induk, APBD 2015, menyalahi aturan. Sebab, undang-undang telah berlaku setahun sebelumnya. Bisa saja, bansos yang telah cair jadi temuan, apalagi untuk APBD Perubahan

2015, akan kami cegah pengalokasian dan pencairannya," jelas Sujanayasa, juga dibenarkan anggota dewan lainnya I Wayan Suastika dan I Ketut Sulandra.

Secara terpisah Kabag Kesjahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Karangasem Ida Bagus Gede Pidada mengakui, bansos hanya untuk lembaga berbadan hukum.

"Nanti kami berkonsultasi dulu ke Menkumham soal itu, sementara kami telah anggarkan bansos di APBD Perubahan 2015, Rp 4 miliar," kata IB Pidada.

IB Pidada memaparkan, lembaga yang tidak bisa menerima bansos seperti: dadia, sekaogong, STT (sekaha teruna teruni), dan sejenisnya. "Bansos hanya bisa teralokasikan, kepada Pramuka, LVRI, KONI, Koperasi dan yang lembaga lainnya berbadan hukum," kata IB Pidada. **k16**

Edisi : Senin, 10 Agustus 2015

Hal : 8



# Krisis Air, Warga Beli Rp 300.000 Per Tanki



WARGA di Banjar Pemuteran, mulai kesulitan air bersih membeli Rp 300.000 per mobil tanki.

AMLAPURA, NusaBali

Sejak sebulan terakhir, warga Banjar Pemuteran, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Karangasem mulai kesulitan air bersih. Warga membeli dengan harga mencekik leher hingga Rp 300.000 per mobil tanki, kapasitas 4 meter kubik. Penyebab mahalnya harga air, karena akses jalan rusak dan lokasinya cukup jauh. Sebaliknya hasil pertanian, terjual murah.

Warga masyarakat menyadari, kesulitan tersebut, hanya saja harapannya kepada pemerintah agar meningkatkan kualitas akses jalan. Agar di kemudian hari bisa menekan harga air. Kelian Banjar Pemuteran I Made Mandi dan tokoh I Ketut Sengker, mengutarakan hal itu di kediamannya, Minggu (9/8).

Banjar Pemuteran sendiri terbagi dalam tiga tempek. Untuk Tempek Kauh, terhubung dengan akses jalan hotmik, sehingga harga air lebih murah per mobil tanki mencapai Rp 180.000. Sedangkan Tempek Pedaringan dan Tempek Samuh, lokasinya di pegunungan bagian timur, terhubung jalan tanah yang ru-

sak dan cukup jauh menjangkau pemukiman penduduk, sehingga harga air per mobil tanki mencapai Rp 300.000.

Jalur menuju Tempek Ped-

aringan dan Tempek Samuh, telah terbangun badan jalan dari PPK (Program Pengembangan Kecamatan) tahun 2005, hanya saja belum pernah ditingkatkan kualitasnya. Sehingga jalan tanah berlubang di beberapa bagian, menyulitkan kendaraan

melintas. "Kami berharap akses jalan tersebut ditingkatkan, agar memudahkan kelancaran roda perekonomian desa, otomatis warga membeli air lebih murah," harap I Made Mandi.

Tokoh masyarakat lainnya I Ketut Sengker, mengaku nasi-

bnya masih lebih baik. Sebab, bermukim di lokasi yang ada akses jalan hotmik, sehingga hanya membeli air per tanki Rp 180.000. "Di sini, mata pencahariannya bertanam sayur, menjual sayur dan hasil pertanian lainnya sangat murah, sebaliknya mem-

beli air mahal," kata Sengker.

Jro Mangku Salya tokoh di Banjar Pemuteran mengakui di setiap musim panas kesulitan air. Tercatat tahun 2012 membeli air per mobil tanki Rp 100.000, nilai itu terus meningkat di tahun 2013 harganya Rp 150.000, menyusul tahun 2014 Rp 200.000, dan terakhir kali membeli hingga Rp 300.000. "Kami membutuhkan air satu mobil tanki untuk 15 hari, cukup untuk 3 KK, beranggotakan 7 orang," kata Mangku Salya.

Walau sebenarnya, katanya, ada dua mata air di Mata Air Sangkokan dan Mata Air Tamba, lokasinya jauh di bawah dan debitnya sangat kecil.

Kesulitan serupa juga terucap dari warga Ni Komang Asin, mengaku membeli air sebulan sekali, dengan harga Rp 300.000. Sebab, kebutuhan untuk berdua. "Air di cubang telah habis, makanya mulai membeli air," katanya.

Warga berharap mendapatkan subsidi air.

Sementara ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Sosial Karangasem I Made Sosiawan mengatakan, selama ini belum ada permintaan warga. "Silakan ajukan permohonan, kami siap bantu gunakan mobil tanki," jelas Sosiawan. **k16**

Edisi : Senin, 10 Agustus 2015

Hal : 8



# Pengolahan Limbah RS

## Belum Standar

### ★ BLH Sulit Keluarkan Izin

Pihak Badan Lingkungan Hidup belum pernah sekalipun terbitkan izin pembuangan limbah cair (IPLC) kepada pihak rumah sakit yang ada di Buleleng.

SINGARAJA, NusaBali

Pengolahan limbah cair di masing-masing rumah sakit di Buleleng, ternyata belum memenuhi standar sesuai dengan peraturan

gubernur (Pergub) nomor 8 Tahun 2007, tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. Badan Lingkungan Hidup (BLH) pun kesulitan terbitkan izin pembuangan limbah cair (IPLC) kepada pihak rumah sakit.

Sesuai Pergub nomor 8 tersebut, limbah cair yang dihasilkan dalam penanganan medis di masing-masing rumah sakit, harus diolah dalam bak pengolahan sebelum dibuang. Untuk menentukan limbah cair itu tidak lagi mengandung zat berbahaya bagi lingkungan, perlu diuji oleh pihak independen. Hasil pengujian inilah yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan IPLC, sesuai Pergub Bali nomor 8.

Kepala BLH Kabupaten Buleleng Nyoman Surya Temaja dikonfirmasi Minggu (9/8) mengakui, jika pihaknya belum pernah terbitkan IPLC untuk rumah sakit yang ada di Buleleng. Namun pihaknya telah melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada semua manajemen rumah sakit baik pemerintah maupun swasta untuk melakukan pengolahan limbah cair.

Disebutkan, beberapa rumah sakit sebenarnya sudah ada yang mengajukan permohonan izin. Namun ketika berkasnya dicek, ternyata syarat yang menyebutkan lulus pengujian baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup tidak ada.

"Belum pernah kita terbitkan izin. Ini karena syarat utama dimana rumah sakit harus mengolah limbah cair dengan bukti lulus uji oleh tim independen belum dapat dipenuhi," terangnya.

Menurut Surya Temaja, pengolahan limbah yang wajib dilakukan itu menyangkut kandungan Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD). Kedua kandungan zat ini harus diolah nantinya limbah cair tidak mengandung zat yang membahayakan dan bisa dibuang kembali ke lingkungan. Dia mencontohkan, pembuangan ini bisa saja limbah cair digunakan untuk pupuk tanaman atau dibuang pada lingkungan sekitar. "Kandungan BOD dan COD-nya itu harus

diolah sampai limbah cair rumah sakit ini tidak membahayakan dan sudah bisa dibuang kembali ke lingkungan. Ini yang belum dilakukan," imbuhnya.

Di sisi lain Surya Temaja mengatakan, meski sebagian besar rumah sakit belum mengantongi izin IPLC itu, pihaknya masih melakukan pendekatan dengan harapan pihak rumah sakit segera melakukan pengolahan dan lanjut menguji limbah cair yang dihasilkan. Selain itu, rata-rata rumah sakit memiliki penampungan limbah cair, sehingga BLH selama ini dengan rutin melakukan pemantauan jangan sampai limbah yang masih membahayakan itu dibuang sembarangan. **k19**

Edisi : Senin, 10 Agustus 2015

Hal : 4



## Tak Terjangkau PDAM, ✓ 20 Desa Dilayani Pamsimas

TABANAN, NusaBali

Masih ada sejumlah desa di Kabupaten Tabanan tak terlayani air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Desa-desanya tersebut selama ini mengandalkan air dari PAM Desa, atau mencari air bersih dari sumber mata air. Pada tahun 2014, Pemkab Tabanan meluncurkan program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) menysasar 20 desa.

Kepala Bappeda Tabanan, Ida Bagus Wiratmaja, mengatakan program Pamsimas ditargetkan mencakup 40 persen dari desa yang ada di Tabanan. Sejak tahun 2014, program ini sudah menysasar 20 desa, dimana 16 desa di antaranya melalui pendanaan APBN dan 4 lainnya melalui pendanaan APBD.

Secara umum kriteria desa sasaran Pamsimas adalah desa yang cakupan akses air minum aman dan sanitasi aman yang masih rendah. Selain itu prevalensi penyakit diare atau penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan tergolong tinggi berdasarkan data Puskesmas.

Desa yang mendapatkan program Pamsimas pendanaan APBN adalah Desa Tajen (Penebel), Desa Timpag (Kerambitan), Desa Wanagiri Kauh (Selemadeg), Desa Gunung Salak (Selemadeg Timur), Desa Tua (Marga), Desa Manikyang (Selemadeg), Desa Pajahan (Pupuan), dan Desa Peken Belayu (Marga).

Sementara dua desa mendapatkan dana dari APBD masing-masing Desa Buruan (Penebel) dan Desa Munduk Temu (Pupuan).

Untuk tahun 2015, 8 desa mendapatkan program Pamsimas lewat pendanaan APBN yaitu Desa Biaung (Penebel), Desa Tegal Jadi (Marga), Desa Beringkit (Marga), Desa Ba-



• NUSABALI/DIANTINI  
Ida Bagus Wiratmaja

bahan (Penebel), Desa Jatiluwih (Penebel), Desa Mengesta (Penebel), Desa Kesiut (Kerambitan) dan Desa Bengkel Sari (Selemadeg Barat). Sementara dua desa dari dana APBD masing-masing Desa Marga dan Desa Selanbawak (keduanya di Kecamatan Marga).

Dikatakan untuk besarnya dana, masing-masing desa tidak sama. Namun rata-rata bantuan diberikan sebesar Rp 250 juta per desa.

"Jumlah ini bisa lebih bisa juga kurang tergantung dari perhitungan pemakaian masing-masing desa," ujar Wiratmaja, Minggu (9/8).

Sementara itu, tahun 2016 sedang diusulkan untuk 10 desa lagi. Terkait pendanaan, selain dana APBN juga diberikan dari dana APBD.

"Biasanya untuk program Pamsimas ini ada usulan dari masyarakat. Nanti tim akan turun untuk memverifikasinya," jelas Wiratmaja.

Ia mengatakan bahwa desa yang menerima program Pamsimas ini nantinya harus mampu menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di bidang AMPL minimal 1 orang di daerahnya.

Namun hal yang terpenting adanya sumber air yang dapat digunakan dalam Pamsimas. Masyarakat juga harus mampu menyediakan kontribusi sebesar 20 persen dari kebutuhan biaya pembangunan serta menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan setelah program Pamsimas ini berjalan.

Mengenai target 40 persen desa di Tabanan tersasar Pamsimas, Wiratmaja mengatakan belum bisa mencapai target. Dari 133 desa, hanya baru 20 desa yang tersasar.

"Kami berusaha agar 40 persen desa di Tabanan bisa melakukan swadaya dalam penyediaan air minum dan sanitasi," katanya. Pihaknya terus mengusulkan desa yang membutuhkan program ini. **cr55**

Edisi : Senin, 10 Agustus 2015

Hal : 7



# UU Tentang Desa Diharapkan Jadikan Desa sebagai Fokus Pembangunan

★ Pemprov Serahkan BKK Desa Pekraman, Subak dan Subak Abian

DENPASAR, NusaBali

Keberadaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diproyeksikan dalam upaya untuk membangun desa dan sumber daya desa yang ada di Indonesia khususnya di Bali mendapat dukungan penuh oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Dukungan diberikan karena sejalan dengan visi Bali Mandara dan juga saat ini desa bukan lagi sebagai objek dan sasaran pembangunan namun menjadi subjek yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan saat membuka Sarasehan Pengelolaan Keuangan Desa di Gedung Ksiramawa, Taman Budaya, Denpasar, Minggu (9/8).

Menurutnya dengan adanya Undang – Undang Desa tersebut, diharapkan desa menjadi fokus pembangunan yang mampu merancang pembangunan berdasarkan potensi dan kebutuhannya, "Dengan adanya undang – undang ini, suara desa kini akan semakin terdengar dan mampu menjadi fokus pembangunan dengan merancang pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya dengan mekanisme yang partisipatif dan komprehensif," jelas Pastika didampingi oleh Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta. Selain sebagai motor penggerak pembangunan desa juga diharapkan mampu sebagai filter untuk menyaring program yang bermanfaat. "Bila diibaratkan wadah, desa merupakan



121  
GUBERNUR, Made Mangku Pastika serahkan dana BKK kepada desa pakraman di sela Sarasehan Pengelolaan Keuangan Desa, Minggu (9/8).

wadah besar pembangunan lintas sektor, namun demikian desa juga harus bisa menjadi filter untuk menyaring program yang bermanfaat sesuai dengan potensi dan prioritas pembangunan setempat", imbuhnya. Dikatakannya, dalam mewujudkan pembangunan desa tersebut juga diperlukan pengelolaan keuangan yang baik. "Pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 telah menggariskan dan mengatur tata kelola keuangan dan aset desa dan sistem tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh pemerintahan desa guna memberikan manfaat bagi pembangunan masyarakat desa", jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa I Ketut Lihadnyana selaku Ketua Panitia kegiatan menyatakan bahwa desa saat ini memiliki potensi yang strategis dan penting dalam pembangunan di Provinsi Bali. Oleh karena itu kegiatan sarasehan pengelolaan keuangan desa yang mengambil tema "Mewujudkan Bali Mandara dari Desa" ini memiliki makna yang sangat strategis dan krusial dalam rangka membangun pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan melayani. Sehingga diharapkan peserta yang hadir dan berpartisipasi memiliki niat yang bulat untuk mendukung dan mensukseskan pembangunan desayang nantinya akan menjadi cerminan pembangunan di Provinsi Bali.

Kegiatan Sarasehan Pengelo-

laan Keuangan Desa Tahun 2015 yang merupakan rangkaian dari peringatan HUT Provinsi Bali yang ke 57 mendatangkan 3 narasumber yakni dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dengan materi Tata Kelola Keuangan Desa dalam Perspektif Membangun Pemerintahan Desa yang Transparan, Akuntabel dan Melayani. Narasumber kedua yakni Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dengan materi Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus bagi Desa Pakraman dan Subak sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan narasumber ketiga yakni Kepala BPMPD Kabupaten Bangli dengan materi best practise implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Kedepannya kegiatan yang diikuti oleh 463 orang peserta yang berasal dari kepala desa lurah dan perangkatnya ini diharapkan mampu memberikan wahana konsolidasi dan koordinasi serta kaji ulang terhadap berbagai kebijakan yang dirumuskan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kegiatan sarasehan juga dirangkaikan dengan penyerahan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Pakraman dengan jumlah masing – masing 200 juta dan Subak/Subak abian masing – masing sebesar 50 juta. Selain itu juga penyerahan hadiah kepada pemenang lomba desa dan kelurahan. @

Edisi : Senin, 10 Agustus 2015

Hal : 3